



EDISI RABU 14 JANUARI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02

GOVERNMENTTODAY
Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN

04

NUSANTARA
Ancaman Kekosongan BBM di SPBU Swasta
Pertamina: Urusan Masing-masing

10

LISTSTYLE
Bye-bye Clean Girl, Hello Maxi-rebel!

KPK ENDUS JEJAK SUAP HINGGA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap pengurangan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. (dok.ist)

ooo

Penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak kembali menyeret kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua direktorat di lingkungan DJP dan menyita dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang yang diduga berkaitan dengan praktik pengurangan nilai pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Langkah ini menandai meluasnya pengusutan perkara yang bermula dari dugaan suap untuk memangkas potensi pajak hingga sekitar Rp 75 miliar. Kasus tersebut menambah panjang daftar skandal perpajakan yang berulang di tubuh DJP, dari era Gayus Tambunan hingga kasus-kasus terkini yang melibatkan pejabat pajak aktif. Pola suap yang bak diadopsi bukan hanya menggerus integritas institusi, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak. Sebuah kondisi yang dapat memukul penerimaan negara dan memperlebar defisit. Hingga menurut Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) layak disebut sebagai 'darurat nasional'. BACA HAL 11...

BEBERAPA KASUS KORUPSI PAJAK DI INDONESIA

Gayus Tambunan (2009)

- Pegawai golongan IIIA
- Kekayaan Rp100 miliar
- Libatkan 27 orang
- Simbol awal terbongkarnya mafia pajak

Angin Prayitno (2021)

- Mantan Direktur Pemeriksaan DJP
- Suap & gratifikasi ± Rp50 miliar
- Libatkan banyak pejabat & konsultan pajak

Rafael Alun Trisambodo

- Eks pejabat Kanwil DJP Jaksel
- Harta Rp56,1 miliar
- Dugaan TPPU
- Transaksi mencurigakan Rp500 miliar (40 rekening)

Bahasyim Assilie

- Suap Rp1 miliar
- Aset disita negara ± Rp61 miliar + US\$681 ribu
- Vonis 10 tahun

Dhana Widayatmika (2012)

- Gratifikasi Rp2,5 miliar
- Vonis akhir: 10 tahun penjara

Eko Darmayanto & Muhammad Dian Irwan

- Total suap miliaran rupiah + valas
- Vonis 9 tahun penjara

Handang Soekarno

- OTT 2016
- Suap Rp1,9 miliar
- Vonis 10 tahun

Abdul Rachman

- Suap Rp1 miliar
- Terkait restitusi proyek Tol Solo-Kertosono
- Kasus masih berjalan

PRABOWO KOREKSI DESAIN DAN FUNGSI IKN

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah instruksi kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Diantaranya koreksi mengenai desain dan fungsi terkait pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Khusus untuk lembaga legislatif dan yudikatif dia minta disebut sehingga IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, menjelaskan OIKN beserta Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk melakukan sejumlah perbaikan, dan mempercepat pembangunan sehingga IKN sebagai Ibu Kota Politik dapat terwujud sesuai target yaitu pada tahun 2028.

"Tadi malam (Senin, 12/1/2026) Beliau (Presiden, red.) mendarat di IKN bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari Ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita, yang Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara (TN) Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2025). (tangkapan layar setpres)

yudikatif, yang harapannya bisa selesai tahun 2028," kata Prasetyo Hadi, Selasa (13/12/2026).

Ketua OIKN yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada Basuki Hadimuljono. "Jadi, tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain,

kedua, mengenai fungsi. OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta terus-menerus untuk memperbaiki," sambung Pras, sapaan akrab Prasetyo.

Di IKN, Presiden Prabowo menginap selama satu malam di hotel bintang lima yang berada di kawasan inti Ibu Kota Nusantara. IKN menjadi

ALOKASI ANGGARAN TAHUNAN IKN (APBN)

2022
RP 5,5 TRILIUN.

2023
RP 27 TRILIUN.

2024
RP 44 TRILIUN
(dengan realisasi sementara sekitar Rp43,3 triliun).

2025
RP 15 TRILIUN
Anggaran ini terbagi untuk Kementerian PUPR (Rp9,11 triliun) dan Otorita IKN (Rp5,89 triliun).

2025
RP6-6,3 TRILIUN
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk tahun 2026 telah resmi ditetapkan sebesar Rp6 triliun pada Januari 2026.

Tarik Lima Investor Baru, Teken 7 Kerja Sama Pemanfaatan Lahan

PROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menarik minat pelaku usaha. Otorita IKN bersama lima investor resmi menandatangani tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN, sekaligus Akta Notarial.

Kelima investor tersebut yakni PT Bahagia Bangunnusa, PT Ranga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, serta PT Haidir Griya Karya yang berada di bawah naungan Asatu Corporation.

Perusahaan-perusahaan ini akan mengembangkan beragam proyek, mulai dari kawasan kuliner, area niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga beserta infrastruktur pendukung lainnya. Kehadiran proyek-proyek tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru di kawasan Nusantara.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan para investor dalam mendukung pembangunan ibu kota

baru. Ia optimistis kerja sama yang diteken tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan aktivitas pembangunan di lapangan.

"Saya ucapkan terima kasih dan saya yakin, kita yang akan menandatangani perjanjian kerja sama investasi hari ini akan segera melakukan pembangunan. Sampaikan juga berita ini ke rekan bisnis bapak-bapak sekalian, ayo berinvestasi ke IKN, pasti akan kami teruskan," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, mengungkapkan bahwa sebagian besar proyek yang tercantum dalam tujuh perjanjian kerja sama tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap pembangunan pada pertengahan 2026. Saat ini, para investor disebut tengah menyiapkan berbagai tahapan lanjutan, termasuk perizinan dan penyempurnaan dokumen kerja sama.

"Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama (PKS) ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Dan saat

ini, para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan juga perizinannya," kata Roi.

Komitmen investasi tersebut juga mendapat sambutan positif dari kalangan investor. Perwakilan PT Batara Maduma Prospernusa, Bob Yanuar, menyampaikan apresiasi atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Ia menilai perkembangan proyek Nusantara menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Terima kasih, kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, saya pikir dan saya amat dengan kepemimpinan bapak Basuki, kemajuan dan perkembangannya luar biasa," ujar Bob.

Penandatanganan kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022. (wid,rls/dya)

tujuan terakhir Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan.

Rombongan menteri yang mengikuti Presiden Prabowo di IKN itu di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angka Raka Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, Menko AHY menjelaskan pengembangan iKN sebagai smart city atau kota cerdas yang terintegrasi dengan teknologi, tidak hanya fokus pada pemanfaatan teknologi-teknologi mutakhir, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan.

"IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat kepada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras," kata AHY sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta. (wid,ist,kum/dya)

DPR RI TETAPKAN 9 ISU PRIORITAS: MITIGASI BENCANA HINGGA REFORMASI POLRI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan sembilan isu strategis yang akan menjadi fokus utama pembahasan pada masa sidang III tahun sidang 2025–2026. Isu-isu tersebut dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, mulai dari penanganan bencana, reformasi aparat penegak hukum, hingga kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa prioritas pertama yang mendapat perhatian serius adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana, khususnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta bahan pangan di wilayah Sumatra dan daerah lain yang terdampak bencana alam.

Menurut Puan, DPR memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional dalam mengawal proses penanganan banjir dan tanah longsor yang kini memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu, DPR telah membentuk satuan tugas khusus pemulihan pascabencana guna memastikan komitmen lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dapat berjalan efektif.

“Sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/1/2026).

Selain mitigasi dan pemulihan bencana, DPR juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Evaluasi ini dinilai penting untuk memperbaiki sistem layanan publik dan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat di masa mendatang.

Isu ketiga yang menjadi perhatian DPR adalah evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara yang tengah dilanda konflik. DPR menilai perlindungan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas negara, terutama dalam situasi geopolitik yang tidak stabil.

Selanjutnya, DPR menempatkan reformasi institusi penegak hukum sebagai isu strategis keempat. Reformasi tersebut mencakup Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, serta lembaga peradilan, guna memperkuat penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Isu kelima menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan



Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 (dari kiri ke kanan) Cucun Ahmad Syamsurijal, Adlies Kadier, Puan Maharani, dan Saan Mustopa saat konferensi pers. Acara ini dilakukan usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).ist

tanpa perlakuan diskriminatif. DPR menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap dijamin, termasuk bagi narapidana dan tahanan.

Sementara itu, penanganan kasus

super flu yang merebak di sejumlah wilayah Indonesia juga masuk dalam agenda prioritas keenam. DPR mendorong pemerintah memperkuat langkah mitigasi, pelayanan kesehatan, serta komunikasi publik

agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Adapun isu ketujuh berkaitan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. DPR menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan pendidikan nasional.

Isu kedelapan adalah persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. DPR menekankan pentingnya peningkatan layanan, transparansi, serta pengelolaan yang akuntabel demi kenyamanan dan keselamatan jamaah.

Sementara isu kesembilan adalah evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan. DPR menilai persoalan ini berkaitan erat dengan bencana ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sejalan dengan fokus mitigasi bencana, Komisi VIII DPR RI juga mulai menggulirkan wacana revisi Undang-Undang Kebencanaan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta izin kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk merevisi regulasi tersebut, menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025. (wid,rls,ant/dya)

KUHP-KUHAP Baru, Puan: Sejarah Pembaruan Hukum RI

KETUA DPR RI Puan Maharani membuka Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 dengan menegaskan komitmen parlemen dalam mengawal pembaruan hukum nasional seiring mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal 2026.

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026), Puan menyebut pemberlakuan regulasi tersebut sebagai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia.

“Pada awal tahun ini telah mulai berlaku Undang-Undang tentang KUHP, Undang-Undang tentang KUHAP, dan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka pembaruan hukum, demokratisasi hukum, dan harmonisasi hukum,” kata Puan.

Puan menegaskan bahwa proses pembahasan undang-undang di DPR

ditempuh melalui perjalanan panjang dengan melibatkan berbagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, DPR berupaya memastikan setiap regulasi yang disahkan benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum nasional.

“Pada masa persidangan ini DPR RI bersama pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional yang telah disepakati bersama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tidak selalu bisa dilakukan secara singkat karena memerlukan pendalaman substansi, dialog publik, serta penyelarasan pandangan antara DPR dan pemerintah.

“Pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Adanya pendalaman materi, proses dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR RI yang perlu diselaraskan secara cermat,” sambung

Puan.

Selain pembaruan hukum, DPR turut menyoroti berbagai isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat. Di antaranya adalah perlindungan dan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-negara konflik, reformasi institusi penegak hukum, hingga penanganan wabah super flu di sejumlah daerah.

“Evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik, proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif,” kata Puan.

Ia menambahkan, DPR juga memberi perhatian pada “penanganan kasus super flu di beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, dan evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.” (wid,ist/dya)

ANCAMAN KEKOSONGAN BBM DI SPBU SWASTA PERTAMINA: URUSAN Masing-Masing

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pengelolaan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta sepenuhnya berada dalam tanggung jawab masing-masing badan usaha pengelola. Penegasan ini disampaikan di tengah polemik potensi kelangkaan BBM di jaringan SPBU swasta seiring wacana pemerintah menghentikan impor solar dan bensin oleh badan usaha hilir migas non-Pertamina.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV, menyatakan bahwa perusahaannya siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah, termasuk rencana penghentian impor solar dan bensin yang belakangan diwacanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Untuk permasalahan kekosongan di SPBU swasta, itu ranah dan tanggung jawab SPBU swasta sendiri; bagaimana mereka mengatur operasional dan bisnis mereka sendiri," kata Roberth saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Roberth menambahkan, hingga kini Pertamina masih menunggu implementasi resmi kebijakan penghentian impor solar serta rencana setop impor bensin oleh operator SPBU swasta. Ia menegaskan, Pertamina akan mengikuti sepenuhnya arahan pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian energi nasional, termasuk langkah-langkah antisipatif



Suasana stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell Jalan Tendea, Jakarta Selatan saat stok BBM kosong tahun lalu. Dok

agar peristiwa kelangkaan BBM di SPBU swasta, seperti yang terjadi pada akhir 2025, tidak kembali terulang.

"Pertanyaan ini akan terjawab nanti pada saat wacana-wacana tersebut dilaksanakan, seperti yang disampaikan Presiden bahwa akan menjawab dengan bukti," ujar Roberth.

Sebagai catatan, pada 2025 pemerintah memang mempersingkat masa berlaku izin impor BBM bagi badan usaha swasta menjadi enam bulan dari sebelumnya satu tahun. Dalam periode singkat tersebut, pemerintah memberikan tambahan kuota impor sebesar 10 persen dibandingkan

UPDATE HARGA BBM PERTAMINA JANUARI 2026 (Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya)

- Peralite (RON 90)
Rp 10.000
- Pertamax (RON 92)
Rp 12.350
- Pertamax Green (RON 95)
Rp 13.150
- Pertamax Turbo (RON 98)
Rp 13.400
- CN 48 (Biosolar)
Rp 6.800
- Dexlite (CN 51)
Rp 13.500
- Pertamina Dex (CN 53)
Rp 13.600

Pengaruhi Pandangan Konsumen soal Kualitas

DORONGAN pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Badan Usaha (BU) minyak dan gas (migas) hilir pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar dapat membeli solar atau minyak diesel dari PT Pertamina (Persero) tanpa adanya impor, akan berpengaruh pada sikap konsumen.

Pakar Kebijakan Publik dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, hal ini dapat dilihat dari adanya isu pada akhir tahun 2025 lalu terkait dengan pembelian base fuel atau minyak mentah dari SPBU swasta kepada Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM mereka hingga akhir tahun.

Jika menjadi sebuah kewajiban, Trubus bilang, konsumen bisa saja memiliki persepsi terkait dengan kualitas solar atau diesel yang dibeli dari kilang Pertamina. "Ya berpengaruh, artinya mereka bisa saja merasa seperti yang kasus BBM kemarin. Pengaruhnya ada, tapi saya rasa jangka pendek, biasanya masyarakat akan mengetahui, berarti sama saja beli (solar) di Pertamina, akan ada pemikiran seperti itu," kata

Trubus, Selasa (13/01/2026).

Meski begitu, Trubus bilang ini adalah langkah yang cukup tepat untuk melindungi kedaulatan energi. Tahap selanjutnya, Pertamina menurut dia harus mampu konsisten terhadap kualitas dan kuantitas solar yang diproduksi jika memang diwajibkan hanya membeli dari dalam negeri.

"Tetapi ini memang upaya pemerintah, mau gak mau, supaya kedaulatan energinya jalan, harus dipaksa supaya membeli ke Pertamina," tambahnya.

Di sisi lain, bergantungnya penjualan solar dalam negeri pada Pertamina menurut dia akan memaksa perusahaan migas plat merah itu agar memperbaiki tata kelola yang ada. Dalam sektor Business-to-Business (B2B) sebagai penjual, Pertamina harus bisa memenuhi spesifikasi sesuai permintaan pembelinya.

"Tata kelola Pertamina agar diperbaiki. Kalau yang beli Shell, Vivo atau yang lain dari luar, mau gak mau harus bisa memperbaiki dirinya sendiri. Apalagi kalau sampai disorot, misalnya kandungannya berbeda, dan tidak sesuai, misalnya dengan keinginan pembeli," tambahnya.

Sebelumnya, dalam catatan,

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim RDMP Balikpapan dapat menambah produksi solar dalam negeri hampir 5 juta kl, sehingga nantinya Indonesia diklaim akan mengalami surplus solar cetane number (CN) 48 sebesar 1,4 juta. Sementara itu, untuk solar berkualitas tinggi atau solar industri CN51, Bahlil mengatakan saat ini Indonesia masih mengimpor sebanyak 600.000 kl

Akan tetapi, dia menyatakan akan turut menyedot impor komoditas migas tersebut pada semester II-2026. "Nanti pada semester ke-2 Pertamina saya minta untuk membangun agar tidak kita impor," tegas Bahlil dalam peresmian RDMP, Senin (12/01/2026).

Disisi lain, Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengatakan pihaknya menyambut baik seiring berjalannya RDMP Balikpapan. Menurutnya pembelian pasokan dari SPBU swasta merupakan kesepakatan bisnis proses dengan hubungan business to business. SPBU swasta masih tetap diperbolehkan untuk berbisnis di Indonesia karena ini juga menjadi hak konsumen untuk memilih SPBU. .wid,ktn,rls/dya)

realisasi sebelumnya. Namun, tingginya permintaan BBM di SPBU swasta membuat kuota tersebut terserap lebih cepat dari perkiraan.

Ketika realisasi impor telah terpenuhi, Kementerian ESDM menolak memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, yang kemudian memicu gangguan pasokan di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.

Sebagai solusi sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan kebijakan agar kebutuhan BBM SPBU swasta dipenuhi oleh Pertamina melalui impor base fuel, yakni BBM dasar tanpa campuran aditif, dengan skema business-to-business (B-to-B).

Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan ambisinya untuk menghentikan impor bensin oleh operator SPBU swasta, menyusul kebijakan setop impor solar bagi badan usaha hilir migas swasta yang telah diberlakukan sejak awal 2026.

"Saya ke depan itu bermimpi, ya nanti sebentar saya akan lapor ke Bapak Presiden, bahwa RON 92, RON 95, RON 98 itu harus diproduksi dalam negeri. Itu sesuai dengan peraturan menteri dan perpres sejak 2005 bahwa kita harus memprioritaskan produk dalam negeri," ujar Bahlil saat ditemui di kawasan RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026)..(wid,ist,kum/dya)

LAGI-LAGI ADA BULLYING PPDS: SENIOR DI FK UNSRI MINTA DIBIYAI DUGEM-PADEL

Dugaan praktik perundungan atau bullying di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lagi-lagi terjadi. Di awal tahun 2026 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Narasi yang beredar luas di media sosial, korban disebut mengalami tekanan berat akibat perundungan yang dilakukan oleh seniornya hingga sempat melakukan upaya bunuh diri dan akhirnya mengundurkan diri dari program PPDS.

Viral di medsos, korban perundungan PPDS FK Unsri menjadi sasaran pemerasan dengan dalih solidaritas senioritas. Bentuk perundungan yang dialami korban disebut berupa pemaksaan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan gaya hidup senior, mulai dari biaya semesteran, aktivitas hiburan malam atau dugem, pembelian produk perawatan kulit, hingga biaya olahraga padel.

Tidak hanya itu, korban juga disebut diminta membayarkan tiket konser, sewa rumah, tiket pesawat, bahkan biaya penelitian milik senior.

Menanggapi kasus tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan telah melakukan pendalaman melalui tim investigasi internal. Hasilnya, Kemenkes memastikan telah ditemukan indikasi kuat terjadinya praktik perundungan dalam bentuk pungutan liar.

"Berdasarkan hasil investigasi tim, diketahui telah terjadi praktik perundungan atau bullying berupa permintaan pembayaran (pungutan liar) oleh peserta PPDS Ilmu Kesehatan Mata," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Kemenkes telah mengirimkan surat resmi kepada Direktur Utama RSUP M. Hoesin Palembang, rumah sakit pendidikan tempat penyelenggaraan PPDS tersebut. Dalam surat itu, Kemenkes menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara program residensi Ilmu Kesehatan Mata FK Unsri.

"Menginstruksikan agar menghentikan sementara penyelenggaraan PPDS atau residensi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUP M. Hoesin," ujar Aji.

Selama masa penghentian sementara tersebut, Kemenkes memberikan kesempatan kepada RSUP M. Hoesin dan Fakultas Kedokteran Unsri untuk segera menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan praktik bullying atau perundungan di lingkungan residensi. Seluruh temuan dan langkah penanganan juga diminta untuk segera dilaporkan kepada pimpinan masing-masing institusi.

"RSUP M. Hoesin dan FK Unsri agar memberikan sanksi yang tegas kepada



Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang.dok

pihak-pihak yang terlibat pada kasus Saudari OA," tegas Aji.

Selain itu, Kemenkes juga meminta kedua institusi menyusun rencana aksi pencegahan perundungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan ke depan. Rencana tersebut harus disepakati bersama dan dilaporkan

progres pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes.

Kasus ini turut mendapat perhatian dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai kasus perundungan di PPDS Unsri harus menjadi momentum evaluasi

menyeluruh terhadap sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.

Menurut Yahya, Kemenkes tidak bisa bekerja sendiri dan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek) untuk memutuskan mata rantai perundungan yang kerap terjadi di lingkungan PPDS.

"Pertama, saya minta Kemenkes untuk melakukan koordinasi dengan Kemendiknasaintek untuk menyetop kasus-kasus bullying di PPDS supaya tidak terulang kembali," kata Yahya saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Ia juga mendorong kedua kementerian tersebut untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan penegakan sanksi terhadap para pelaku perundungan, khususnya senior yang menyalahgunakan relasi kuasa terhadap junior. (wid,ist,kum/dya)

RSMH Palembang Bentuk Tim Khusus



Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang.dok

DUGAAN praktik perundungan di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) menjadi sorotan setelah seorang mahasiswi berinisial OA nyaris mengakhiri hidupnya.

Direktur Utama RSUP Dr Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, Siti Khalimah, membenarkan bahwa OA merupakan peserta PPDS yang tengah menjalani pendidikan spesialis mata dan bertugas di rumah sakit tersebut.

"Yang bersangkutan memang bertugas di RSMH sebagai peserta PPDS," ujar Siti, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya, karena persoalan ini berkaitan langsung dengan proses pendidikan dan ke-mahasiswaan, penanganan utama berada di bawah kewenangan Fakultas Kedokteran Unsri.

"Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh pihak Fakultas Kedokteran Unsri," kata Siti.

Meski begitu, pihak rumah sakit tidak tinggal diam. Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, RSMH bersama FK Unsri telah membentuk tim khusus pencegahan dan penanganan perundungan.

Selain itu, sosialisasi larangan bullying dilakukan secara berkala kepada seluruh peserta PPDS.

"Kami menyiapkan mekanisme penindakan terhadap pelaku,

perlindungan bagi pelapor, serta dukungan psikososial untuk meningkatkan ketahanan mental dan kebersamaan antar-PPDS," ucap Siti.

Sementara itu, Unsri menegaskan komitmennya menangani kasus ini secara institusional. Rektor Unsri telah menugaskan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) untuk terlibat langsung dalam proses investigasi.

Kepala Kantor Humas dan Protokol Unsri, Nurly Meilinda, menyebut proses klarifikasi telah dilakukan dengan meminta keterangan dari berbagai pihak di lingkungan akademik, termasuk senior dan sejawat korban.

"Langkah ini ditempuh agar kampus memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang sebelum mengambil keputusan lanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Selain investigasi, Fakultas Kedokteran Unsri juga memberikan pendampingan akademik dan non-akademik berupa layanan konseling sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan peserta didik. (wid,kum/dya)

Kerugian Kabupaten Malang Akibat Bencana di 2025 Capai Rp729 Juta



MALANG- Kabupaten Malang dilanda ratusan bencana alam sepanjang tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat total ada 435 kejadian dengan kerugian materiil mencapai Rp729,1 juta.

"Gempa bumi memang tercatat cukup banyak, namun tidak semuanya dirasakan," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD

Kabupaten Malang, Sadono Irawan, dikutip pada Selasa (13/1/2026).

Ditambahkannya, sepanjang tahun 2025 juga tidak ditemukan kejadian bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dampak erupsi gunung api, menurutnya juga dipastikan tidak memengaruhi wilayah Kabupaten Malang.

Lebih lanjut, Sadono menyebutkan mayoritas bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang. Kondisi cuaca ekstrem yang berlangsung hampir sepanjang tahun disebut menjadi faktor utama tingginya intensitas kejadian bencana di wilayah tersebut.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, bencana tanah longsor

menjadi yang paling dominan dengan 98 kejadian, disusul angin kencang sebanyak 74 kejadian, pohon tumbang 53 kejadian, serta banjir 23 kejadian. Selain itu, tercatat pula 187 kejadian gempa bumi, meskipun sebagian besar tidak dirasakan oleh masyarakat.

Dari sisi waktu kejadian, tanah longsor paling banyak terjadi pada bulan Januari dengan 26 kejadian, kemudian bulan Desember sebanyak 18 kejadian. Kondisi curah hujan tinggi di awal dan akhir tahun disebut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi longsor.

Secara wilayah, katanya, Kecamatan Poncokusumo tercatat sebagai daerah paling rawan longsor dengan 13 kejadian. Disusul Kecamatan Lawang, Ngantang, dan Pujon yang masing-masing mengalami 10 kejadian tanah longsor sepanjang tahun lalu.

"Wilayah-wilayah tersebut secara geografis berada di kawasan lereng dan perbukitan, sehingga memiliki tingkat kerawanan longsor yang cukup tinggi," jelas Sadono.

Rentetan bencana alam tersebut berdampak signifikan terhadap kerusakan

bangunan milik warga maupun fasilitas umum. Pihaknya mencatat, total kerugian materiil mencapai Rp729,1 juta, yang dihitung dari kerusakan rumah warga dan sejumlah sarana publik akibat bencana.

Rincian kerusakan menunjukkan sebanyak 433 rumah dan bangunan mengalami kerusakan ringan, 80 bangunan rusak sedang, serta 33 rumah mengalami kerusakan berat. "Kecamatan Dau menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan bangunan paling tinggi akibat bencana alam sepanjang 2025," katanya.

Selain kerugian materiil, bencana alam juga menimbulkan korban jiwa. BPBD mencatat dua orang meninggal dunia, satu orang dilaporkan hilang, serta 17 orang mengalami luka-luka, terutama pada periode Januari ketika intensitas longsor dan banjir cukup tinggi.

Sadono menegaskan, tingginya angka kejadian bencana pada 2025 menunjukkan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya di wilayah-wilayah rawan. (Santi/Dya)

Cek Kesehatan Gratis Kota Malang Baru Jangkau 22% Warga, Ada Apa?

MALANG - Takut mengetahui penyakit menjadi alasan rendahnya partisipasi warga dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Malang. Akibatnya, hingga akhir tahun 2025, capaian pemeriksaan kesehatan tersebut baru menjangkau 22 persen dari total penduduk.

"Capaian Cek Kesehatan Gratis di Kota Malang ini kan masih proses, ya. Jadi di kami baru 22 persen sepanjang 2025 kemarin. 22 persen itu dari seluruh jumlah sasaran. Kan sasarannya semua penduduk," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, Senin (13/1/2026).

Dijelaskannya, capaian 22 persen tersebut setara dengan hampir 200 ribu warga. Angka itu diperoleh dari total jumlah penduduk Kota Malang yang mencapai sekitar 900 ribu jiwa. "Kalau 22 persen itu dikalikan 900 ribu jumlah penduduk Kota Malang, berarti hampir 200 ribuan," jelasnya.

Husnul menambahkan, capaian tersebut sudah mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)

Malang yang jumlahnya sekitar 11 ribu orang. Selain itu, anak-anak sekolah juga sudah termasuk dalam pelaksanaan CKG.

Lebih lanjut, terkait masih rendahnya partisipasi masyarakat, Husnul menyebut salah satu kendala adalah minimnya kesadaran warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, meski layanan CKG mudah diakses dan diberikan secara gratis.

"Kecenderungan masyarakat memang masih belum sadar penuh untuk cek kesehatannya. Padahal aksesnya mudah. Di beberapa wilayah, kami lihat ada ketakutan bertemu penyakit," ungkap Husnul.

Menurutnya, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran jika hasil pemeriksaan justru menemukan penyakit tertentu, yang dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi psikologis maupun biaya pengobatan ke depan.

"Ya, alasannya banyak yang takut kalau periksa ketemu sakit apa dan bagaimana. Padahal sudah kami sampaikan, kalau diperiksa dan ketemu penyakitnya, justru itu deteksi

lebih awal. Penanganannya bisa lebih cepat," tegasnya.

Dari hasil CKG yang telah dilakukan, Dinkes Kota Malang mencatat mayoritas diagnosis yang ditemukan merupakan penyakit tidak menular. Di antaranya hipertensi dan gangguan kadar gula darah.

Husnul memastikan, meski CKG bersifat pemeriksaan kesehatan dasar, masyarakat tetap akan mendapatkan tindak lanjut apabila ditemukan indikasi penyakit tertentu. Dinkes akan memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat sesuai domisili warga.

Sementara itu, untuk meningkatkan capaian hingga mendekati 100 persen, Husnul mengaku terus melakukan berbagai upaya jemput bola. Termasuk pelaksanaan CKG yang kini dilakukan di berbagai lini pelayanan masyarakat. "Kemudian pada event-event nanti seperti Car Free Day juga akan kami lakukan CKG," paparnya.

Langkah proaktif tersebut



dilakukan karena jika hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, sambungnya, capaian CKG dikhawatirkan akan berjalan lambat dan sulit menembus angka partisipasi tinggi. "Kalau menunggu datangnya masyarakat, sepertinya untuk mencapai 70 persen saja agak lama. Jadi kami harus proaktif," tambahnya. (Santi/Dya)

TRUMP ANCAM TARIF 25% BAGI MITRA DAGANG IRAN

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang peta perdagangan global. Di tengah eskalasi politik dan gelombang protes besar di Iran, Trump melontarkan ancaman penerapan tarif impor sebesar 25 persen terhadap negara-negara yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Teheran. Apakah Indonesia aman?

Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif tambahan atas seluruh transaksi dagang mereka dengan Amerika Serikat.

"Perintah ini bersifat final dan mengikat," tulis Trump, dilihat Selasa (13/1/2026) seraya menambahkan bahwa kebijakan tersebut akan segera diberlakukan terhadap mitra dagang Iran yang juga memiliki hubungan ekonomi dengan AS.

Pernyataan keras yang diunggah Senin (12/1/2026) waktu setempat itu muncul di tengah situasi genting di Iran, menyusul penindakan aparat keamanan terhadap aksi protes anti-pemerintah yang meluas di berbagai wilayah. Gelombang demonstrasi tersebut disebut-sebut sebagai salah satu tantangan terbesar bagi rezim ulama sejak Revolusi Islam 1979.

Laporan kelompok pemantau hak asasi manusia menyebut ratusan orang tewas dalam beberapa pekan



Ribuan warga yang mendukung pemerintah Iran turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Teheran, Senin (12/1/2026). (REUTERS)

terakhir, meski angka pastinya belum dapat diverifikasi secara independen. Sejumlah saksi mata kepada BBC mengungkapkan bahwa aparat keamanan Iran menembak langsung ke arah massa demonstran, menyebabkan korban roboh di tempat.

Media pemerintah Iran mengklaim situasi telah terkendali sejak Senin malam. Namun, BBC menyatakan masih menerima rekaman yang menunjukkan demonstrasi berlanjut di sejumlah lokasi, meski sulit

diverifikasi akibat pemutusan jaringan internet nasional selama lebih dari empat hari. Koresponden AFP di Teheran juga melaporkan bahwa layanan panggilan telepon internasional baru kembali dibuka pada Selasa, meski terbatas pada panggilan keluar.

Gedung Putih menyatakan bahwa Trump tetap membuka opsi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran, walaupun diplomasi masih menjadi pendekatan utama.

FAKTA-FAKTA TERKAIT SITUASI TERKINI DI IRAN:

- **Penyebab Utama:**
Krisis ekonomi akut (inflasi, krisis moneter, rial anjlok) bercampur tuntutan kebebasan sipil dan penggulingan Khamenei. Ini bukan sekadar soal harga, tapi soal legitimasi rezim.
- **Jumlah Korban:**
Klaim resmi ±2.000 tewas; lembaga HAM memperkirakan ratusan hingga ribuan korban akibat represi aparat. Angka pastinya sengaja dikaburkan.
- **Pertumbuhan PDB:**
Proyeksi IMF 0,6–1,1% (2026); skenario buruk menunjukkan kontraksi hingga -2,8% akibat perang dan sanksi. Artinya: stagnansi atau mundur.
- **Inflasi:**
Resmi 35–42%, tapi inflasi riil pasar sudah tembus ~70%. Harga pangan melonjak >75%—pukulan langsung ke rakyat miskin.
- **Nilai Tukar Rial:**
Anjlok ke 1,45–1,47 juta IRR/USD di pasar bebas; hampir setengah nilai hilang sepanjang 2025. Kepercayaan pasar nyaris nol.
- **Pengguguran:**
Diprojektikan sekitar 9,2% pada 2026—angka resmi yang kemungkinan meremehkan kondisi riil.
- **Sektor Dominan:**
Jasa menyumbang ±51% PDB; sektor minyak makin tercekik oleh ancaman tarif AS 25% pada mitra Iran.
- **PDB per Kapita:**
Sekitar USD 4.250; peringkat global ~134. Jauh dari narasi negara kaya energi.



Tim keamanan nasional AS dijadwalkan menggelar rapat khusus untuk membahas berbagai opsi, termasuk langkah militer dan operasi rahasia, setelah Trump menerima paparan dari para pejabat keamanan, menurut keterangan sumber kepada CBS.

Ancaman tarif ini bukan sekadar sanksi bilateral terhadap Iran, melainkan mencerminkan apa yang disebut sebagai secondary sanctions, yakni hukuman ekonomi yang menargetkan seluruh jaringan perdagangan global yang memiliki keterkaitan dengan Iran.

Jika benar-benar diterapkan, tarif 25 persen akan meningkatkan biaya impor barang dari negara-negara yang memiliki relasi ekonomi dengan Iran ke pasar AS. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut berpotensi memicu babak baru perang dagang di tengah kondisi pasar global yang sudah rapuh. (abc,ist,bbc/dya)

Demo Pro-Pemerintah Digelar di Tengah Sinyal Serangan AS

KETEGANGAN di Iran terus meningkat seiring berlanjutnya gelombang protes antipemerintah yang memicu respons keras aparat keamanan. Di tengah situasi tersebut, puluhan ribu hingga jutaan warga Iran menggelar aksi demonstrasi pro-pemerintah di ibu kota Teheran pada Senin (12/1/2026) waktu setempat, sebagai tandingan atas unjuk rasa antipemerintah yang telah mengguncang negara itu selama beberapa hari terakhir.

Aksi pro-pemerintah ini dihadiri langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Tayangan televisi pemerintah Iran memperlihatkan massa memenuhi jalan-jalan utama Teheran sebelum berkumpul di Alun-alun Enqelab. Aksi tersebut diberi nama "pemberontakan Iran melawan terorisme Amerika-Zionis."

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, berpidato di hadapan massa dan melontarkan kecaman keras terhadap Barat. Ia

menegaskan bahwa Iran saat ini menghadapi ancaman di berbagai lini sekaligus.

"Perang ekonomi, perang psikologis, perang militer melawan AS dan Israel, dan hari ini, perang melawan terorisme," ujar Ghalibaf.

Dalam tayangan berbagai media pemerintah Iran, massa aksi meneriakkan slogan bernada anti-Barat, termasuk seruan "Matilah Israel, Matilah Amerika" dalam bahasa Persia. Ghalibaf juga memperingatkan bahwa militer Iran akan memberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump "pelajaran yang tak terlupakan" jika Iran diserang.

Presiden Masoud Pezeshkian tampak berjalan di tengah kerumunan massa dengan pengawalan ketat, sebagaimana ditayangkan Al Jazeera. Media yang didanai Qatar tersebut diizinkan melaporkan langsung dari Iran, meskipun akses internet nasional dilaporkan dimatikan selama aksi berlangsung.

Dalam pernyataannya yang

dikutip Press TV, Pezeshkian menyebut aksi pro-pemerintah ini sebagai bukti "kewaspadaan dan tanggung jawab yang tak tertandingi" rakyat Iran dalam membela nilai-nilai agama dan nasional dari "musuh-musuh yang menindas dan para teroris."

Selain presiden, Menlu Abbas Araghchi juga hadir langsung. Media lokal IRIB News menayangkan Araghchi berjalan di tengah massa pendukung pemerintah dengan pengawalan keamanan. Kepada para diplomat asing di Teheran, Araghchi menegaskan bahwa "situasi telah sepenuhnya terkendali."

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tidak hadir secara fisik, namun menyampaikan pesan yang disiarkan televisi pemerintah.

"Aksi besar-besaran ini, penuh tekad, telah menggagalkan rencana musuh-musuh asing yang akan dilakukan oleh para tentara bayaran domestik," ucap Khamenei. (ist,bbc,rls/dya)

ABAI GOSOK GIGI, ANAK DI MALAYSIA KEHILANGAN 12 GIGI SUSUNYA

Mengajarkan anak untuk rajin gosok gigi memang bisa jadi tantangan tersendiri. Tapi, hal itu tetap harus dibiasakan, sebab gigi susu yang terawat bisa menunjang kesehatan anak. Sebab, dengan gigi susu yang sehat, si kecil bisa lebih optimal menyerap nutrisi dari makanan yang ia konsumsi. Kasus viral terbaru, akibat tidak rajin menyikat gigi, seorang anak laki-laki di Terengganu, Malaysia, harus menjalani pencabutan 12 gigi susu sekaligus akibat kerusakan gigi yang sudah sangat parah.

Dikutip dari Sin Chew Daily, anak tersebut memiliki kebiasaan tidur tanpa menyikat gigi setelah minum susu. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak ia masih bayi dan terus berlanjut hingga usia sekitar 4 tahun. Selain itu, aktivitas menyikat gigi juga tidak dilakukan secara teratur, sehingga sisa susu dan makanan menumpuk dan

perlahan merusak gigi.

Awalnya, kondisi ini tidak langsung disadari. Namun, beberapa bulan sebelum tindakan medis dilakukan, sang anak mengalami beberapa tanda, seperti mengeluhkan sakit kepala hebat saat bangun tidur. Bahkan sampa muntah dan nafsu makan menurun drastis.

Akhirnya, sang ibu membawanya berobat ke beberapa klinik, tetapi kondisi anak tidak kunjung membaik. Anak tersebut kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan seperti CT scan. Namun, hasilnya tidak menunjukkan adanya kelainan.

Setelah dilakukan evaluasi mendalam, akhirnya ditemukan beberapa kondisi yang cukup serius, yaitu tekanan darah yang tidak normal, adanya lubang kecil di jantung dan kerusakan gigi yang sudah mencapai saraf dan akar.

Dokter menjelaskan, kondisi gigi yang telah rusak hingga bagian terdalam berisiko menyebabkan infeksi berulang jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, satu-satunya solusi yang aman adalah mencabut seluruh gigi susu yang terdampak.

Akhirnya, sang anak harus menjalani prosedur bedah mulut untuk mencabut 12 gigi susu sekaligus. Syukurnya, operasi berjalan lancar dan kondisi anak kini telah pulih dengan baik. Menurut sang ibu, Haliza, kondisi ini juga tidak memengaruhi pertumbuhan gigi permanen anak nantinya, karena yang dicabut adalah gigi susu, Moms. Haliza juga mengungkapkan rasa leganya setelah putranya melewati proses tersebut dengan baik. Ia pun berharap kisah ini bisa menjadi pengingat bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan kebersihan.

Cara Agar Anak Semangat Sikat Gigi

Di sisi lain, Dokter Gigi, drg. Nurvita Sari membagikan beberapa tipsnya di agar anak semakin semangat sikat gigi.

Pilih Sikat Gigi dengan Karakter Lucu

Salah satu cara membuat anak antusias menyikat gigi adalah dengan memilih sikat gigi dengan karakter lucu favorit mereka. "Nanti setiap dua bulan diganti lagi, karakternya berbeda-beda. Jadi anak-anak tuh excited kalau siap mau sikat gigi," kata drg. Nurvita. Sikat gigi khusus anak juga umumnya memiliki kepala yang kecil, sehingga membuat anak lebih nyaman.

Gunakan Pasta Gigi dengan Rasa yang Disukai Anak

Selain sikat gigi, rasa pasta gigi juga penting. Misalnya, memberikan pilihan pasta gigi dengan rasa buah yang disukai, agar anak merasa nyaman dan tidak terganggu oleh rasa yang terlalu pedas.

Pentingnya Menjaga Gigi Susu Anak

Banyak yang mengira gigi susu hanya sementara dan tidak perlu dirawat dengan serius. Padahal, gigi susu sangat penting untuk menjaga ruang agar gigi permanen tumbuh dengan baik dan rapi.

Selain itu, bila gigi susu rusak dan dicabut terlalu dini, ruang yang seharusnya dijaga bisa menyempit. Akibatnya, saat gigi permanen tumbuh, posisinya bisa miring, tidak sejajar, atau bahkan bertumpuk. "Kalau gigi susu sudah rusak atau dicabut sebelum waktunya, biasanya gigi permanen akan tumbuh miring dan bertumpuk," ujar drg. Nurvita. (wid,kum/dya)



Penyebab Karies Gigi Anak Selain Makanan Manis

Gigi berlubang atau karies pada anak sering kali langsung dikaitkan dengan kebiasaan mengonsumsi makanan manis atau jarang menyikat gigi. Padahal, menurut dokter gigi anak, penyebab karies jauh lebih kompleks dan banyak di antaranya tidak disadari oleh orang tua.

Dokter spesialis gigi anak, drg. Joshua Calvin, Sp.KGA, menjelaskan karies terjadi ketika bakteri di dalam mulut menghasilkan asam yang merusak lapisan gigi. Beberapa kebiasaan berikut ikut andil dalam merusak gigi anak.

Sering Makan di Luar Jam Makan Utama

Menurut drg. Joshua, salah satu penyebab yang kerap luput diperhatikan adalah kebiasaan anak makan atau minum di luar jam makan utama. "Bukan hanya makanan manis, makanan yang terlihat tidak manis pun jika dikonsumsi terlalu sering bisa membuat kondisi mulut menjadi asam," jelas drg. Joshua.

Kondisi mulut yang asam inilah yang memudahkan bakteri merusak email gigi dan memicu karies, Moms.

Minum Susu Sebelum atau Saat Tidur
Kebiasaan lain yang sering dianggap sepele adalah memberikan susu sebelum anak tidur. "Walaupun susu itu sehat, di dalamnya tetap mengandung gula alami. Jika diminum sebelum tidur tanpa dibersihkan, gula ini bisa menempel di gigi semalaman," jelas drg. Joshua.

Mulut Kering Akibat Bernapas Lewat Mulut

Anak yang terbiasa bernapas lewat mulut, terutama saat tidur dengan kondisi mulut terbuka, juga berisiko lebih tinggi mengalami karies. Pasalnya, air liur berfungsi melindungi gigi dari bakteri. Ketika mulut menjadi kering akibat bernapas lewat mulut, bakteri akan lebih leluasa berkembang dan merusak gigi.

Gigi Berlubang yang Tidak Dirawat

Masalah lain yang sering terjadi adalah membiarkan gigi berlubang tanpa perawatan. Satu gigi yang berlubang saja dapat menjadi sumber bakteri dan meningkatkan risiko kerusakan pada gigi lainnya. Oleh karena itu, gigi berlubang pada anak sebaiknya tetap dirawat, meskipun

masih berupa gigi susu.

Kesehatan Gigi Orang Tua

Fakta yang jarang diketahui, kondisi kesehatan gigi orang tua juga dapat berdampak pada kesehatan gigi anak lho. Jika orang tua memiliki banyak gigi berlubang, bakteri dapat berpindah ke anak melalui penggunaan sendok yang sama, ciuman, atau berbagi makanan.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membangun kebiasaan menjaga kesehatan gigi sejak dini.



Wanti-wanti Ilmuwan: 2026 Jadi Tahun Keruntuhan Terumbu Karang di Seluruh Dunia

Terumbu karang di wilayah tropis memang hanya mencakup kurang dari 1 persen permukaan dasar laut dunia. Namun, ekosistem ini menjadi rumah bagi sekitar seperempat dari seluruh spesies laut. Ironisnya, kekayaan biodiversitas tersebut sangat rentan terhadap kerusakan. Dalam beberapa dekade terakhir, diperkirakan sekitar 30 hingga 50 persen terumbu karang di dunia telah mengalami kerusakan atau hilang.

Kini, para ilmuwan memperingatkan dunia sedang mendekati ambang batas yang mengkhawatirkan. Setelah gelombang panas laut ekstrem pada 2023–2024, yang memicu pemutihan karang di setidaknya 83 negara, tahun 2026 dipandang dengan kecemasan yang kian besar.

Pertanyaannya, apakah 2026 akan menjadi titik balik global bagi terumbu karang perairan hangat, sebuah titik tanpa kembali, ketika bahkan spesies karang paling tangguh pun tak lagi mampu pulih?

Dalam *The Conversation*, Samantha Garrad, Peneliti Senior Ekosistem Laut di Plymouth Marine Laboratory, nasib terumbu karang dunia sangat bergantung pada apa yang terjadi di Samudra Pasifik, khususnya siklus iklim alami El Niño–Southern Oscillation (ENSO). Dunia baru saja keluar dari fase El Niño yang merusak, fase hangat ENSO, yang mendorong 84 persen terumbu karang global ke tingkat stres panas yang memicu pemutihan.

Dalam kondisi normal, terumbu karang memiliki waktu bernapas selama fase La Niña yang lebih sejuk. Namun, pemanasan global membuat El Niño semakin kuat dan sering, sementara masa transisinya kian singkat dan kurang dingin.

Dengan El Niño berikutnya diperkirakan terjadi pada 2026, hanya berselang singkat dari kejadian sebelumnya, banyak terumbu karang belum sempat pulih sepenuhnya. Para ilmuwan memperingatkan, fase ini berpotensi memicu keruntuhan terumbu karang secara luas.

Kekhawatiran terbesar adalah 2026 menjadi tipping point, momen ketika sebuah ekosistem berubah secara drastis dan sulit, bahkan mustahil untuk dipulihkan.

Masalahnya, titik-titik kritis seperti ini sulit dikenali saat terjadi. Setiap terumbu karang memiliki karakteristik berbeda, dan perubahan permanen sering tersamarkan oleh guncangan jangka pendek seperti gelombang panas dan cuaca ekstrem, di tengah suhu global yang terus meningkat.

Meskipun skenario terburuk berupa titik balik global serentak pada 2026 tergolong kecil, di tingkat lokal banyak terumbu karang perairan hangat hampir pasti terdampak parah. Beberapa bahkan sudah melewati titik tanpa kembali, dan jika gelombang panas ekstrem kembali melanda wilayah tropis dalam waktu dekat, kerusakan dalam 12 bulan ke depan bisa bersifat

katastropik.

Gambaran Keruntuhan Terumbu Karang

Keruntuhan terumbu karang biasanya diawali dengan pemutihan (bleaching), ketika suhu laut terlalu tinggi. Dalam kondisi stres, karang mengusir alga mikroskopis berwarna yang hidup di jaringannya, membuat karang tampak putih. Karang belum mati pada tahap ini. Namun jika panas berlangsung terlalu lama, kematian karang tak terhindarkan.

Spesies yang paling sensitif terhadap panas akan lenyap lebih dulu. Ketika karang mati, alga dengan cepat mengambil alih, sehingga larva karang baru sulit tumbuh. Kerusakan ini bisa berlangsung sangat lama, bahkan membuat terumbu tak pernah kembali seperti semula.

Meski begitu, tidak semua terumbu karang akan bernasib sama. Ketahanan terhadap panas berbeda di tiap wilayah. Karang di Teluk Aqaba, antara Semenanjung Sinai, Mesir, dan Arab Saudi, serta di Madagaskar terbukti mampu bertahan cukup baik pada suhu ekstrem 2023–2024, menandakan adanya ketahanan alami pada komunitas karang tertentu.

Terumbu di perairan yang lebih dalam dikenal sebagai terumbu mesofotik pada kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter juga berpotensi menjadi “bank benih” masa depan. Lapisan air yang lebih dingin melindungi mereka saat gelombang panas, memberi peluang lebih besar bagi karang untuk bertahan, setidaknya dalam waktu dekat.

Meski suhu laut diprediksi meningkat pada 2026, pemutihan karang juga dipicu oleh tekanan lain seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan pembangunan pesisir. Kabar baiknya, pengurangan tekanan lokal ini terbukti membantu pemulihan.

Contohnya Terumbu Karang Mesoamerika, yang membentang hampir 1.100 kilometer di sepanjang pesisir Meksiko dan Amerika Tengah. Meski 40 persen wilayahnya mengalami pemutihan pada 2024, beberapa bagian menunjukkan perbaikan setelah populasi ikan pulih berkat pengelolaan perikanan yang lebih baik.

Ancaman lain adalah pengasaman laut, akibat penyerapan CO₂ oleh samudra. Kondisi ini menyulitkan karang membentuk kerangka kerasnya, memperlambat pertumbuhan, dan melemahkan struktur, bahkan mengancam karang laut dalam yang tidak mengalami pemutihan. (ist, kum/dya)



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LETERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Bye-bye Clean Girl, Hello Maxi-rebel!

Memasuki awal 2026, wajah jalanan di pusat mode dunia seperti Seoul, Tokyo, hingga Paris tak lagi menampilkan estetika yang sama seperti beberapa tahun sebelumnya.

Dominasi palet warna netral, potongan bersih, dan siluet sederhana yang selama ini dipuja sebagai simbol quiet luxury kini perlahan tersingkir dari sorotan utama.

Estetika yang dulu dianggap dewasa, mapan, dan berkelas itu mulai kehilangan daya tariknya di mata generasi baru.

Sebagai gantinya, muncul sebuah gelombang besar yang oleh para pengamat mode dijuluki maximalist rebellion—sebuah perlawanan visual terhadap keseragaman, yang menghadirkan busana penuh ekspresi, tekstur berlapis, dan keberanian tanpa kompromi.

Perubahan drastis ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari kejenuhan

kolektif generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, terhadap gaya hidup visual yang terlalu rapi, bersih, dan seragam.

Estetika clean girl, yang sempat merajai media sosial dengan citra kulit flawless, pakaian monokrom, dan detail minimal, kini dianggap kaku dan membatasi ruang ekspresi personal.

Anak muda mulai mencari narasi yang lebih emosional, puitis, dan bahkan sedikit liar sebuah pendekatan yang kemudian dikenal dengan istilah poetcore.

Dalam tren ini, pakaian tidak lagi berfungsi semata sebagai pelindung tubuh, melainkan sebagai medium bercerita tentang identitas, perasaan, dan imajinasi pemakainya.

Di bawah payung maximalist rebellion, kombinasi yang dulu dianggap “terlalu ramai” justru menjadi kekuatan utama.

Kemeja putih bervolume dengan lipit dramatis dan detail renda bergaya Victoria kini dipadukan secara kontras dengan rompi bermotif mencolok, celana potongan asimetris, atau aksesoris berukuran tidak lazim.

Benturan antara unsur romantik, vintage, dan futuristik menciptakan tampilan yang terasa personal sekaligus teatrikal. Tidak ada lagi aturan baku soal harmoni yang ada hanyalah keberanian untuk menabrakkan ide.

Lantas, bagaimana fenomena ini bisa meledak begitu cepat, khususnya di kuartal pertama 2026? Jawabannya tak lepas dari

realitas kehidupan digital yang kian padat dan kompetitif.

Di tengah banjir konten visual yang terus mengalir di layar gawai, tampil “aman” berarti mudah tenggelam. Maximalisme hadir sebagai strategi visual sekaligus pernyataan sikap: semakin mencolok, semakin mudah dikenali.

Jika sebelumnya aksesoris kecil dianggap sebagai puncak elegansi, kini filosofi more is more kembali berjaya. Bros keramik berukuran raksasa, kalung bertumpuk, hingga wedge sneakers bersiluet futuristik menjadi simbol bagaimana elemen masa lalu

dan masa depan dapat bertabrakan, namun tetap terasa selaras.

Singkatnya, tahun 2026 menjelma menjadi panggung besar bagi mereka yang berani tampil berbeda dan menolak dikotakkan oleh standar estetika lama.

Dengan kembalinya warna-warna berani, cetakan ekstrem, dan potongan dramatis, dunia mode secara resmi melepaskan diri dari batasan konvensional. Tren ini menegaskan satu hal: dalam fashion, keberanian adalah mata uang yang tidak pernah kehilangan nilai. (Nathasya – UINSA berkontribusi dalam tulisan ini.)

Karakteristik Utama Maximalist Rebellion

Warna & Cetakan Berani Palet cerah, warna teknis, serta pola yang saling bertabrakan seperti motif bunga dipadukan dengan kotak-kotak—menggantikan dominasi warna kalem dan monokrom.

Pencampuran Eklektik

Gaya ini menggabungkan item vintage, thrifted, antik, hingga desain modern dari berbagai era, menciptakan tampilan berlapis yang unik dan penuh cerita.

Detail Kemewahan & Hiasan

Ruffles, pita, bordir rumit, tekstur mewah, serta kemegahan yang terinspirasi dari era rococo menjadi elemen kunci dalam membangun kesan dramatis.

Personalisasi

Setiap tampilan dirancang sebagai refleksi identitas individu—bukan sekadar mengikuti tren, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan ekspresi diri.

Kekacauan yang Terkendali

Meski terlihat ramai, setiap elemen tetap dikurasi dengan sadar. Hasilnya adalah stimulasi visual yang kaya, bukan kekacauan tanpa arah.

Reaksi terhadap Minimalisme

Maximalist rebellion berdiri sebagai penolakan terhadap desain yang dianggap terlalu steril, aman, dan minim emosi yang mendominasi dekade sebelumnya.

Implementasi dalam Berbagai Gaya Hidup

Fashion

Perhiasan tebal, korset yang dipadukan dengan jeans, siluet ekstrem, kain berhias, dan pelapisan dramatis menjadi ciri utama.

Interior

Wallpaper bermotif kaya, tekstil berlapis, warna berani, furnitur dari berbagai gaya, serta koleksi dekorasi pilihan mendominasi ruang.

Desain & Branding

Merek mulai mengadopsi visual yang lebih berani dan berorientasi pada kepribadian, demi menonjol di tengah pasar yang semakin padat dan kompetitif. Identitas visual kini tidak lagi sekadar soal logo atau palet warna, melainkan tentang membangun karakter yang kuat dan mudah dikenali. (*)



KPK Endus Jejak...dari hal 1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan praktik suap pemeriksaan pajak yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Terbaru, penyidik lembaga antirasuah itu menggeledah Kantor Pusat DJP di Jakarta dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang tunai yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT). Penggeledahan difokuskan pada dua Direktorat strategis di lingkungan DJP pusat.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan suap pemeriksaan pajak, hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Menurut Budi, penyidik menggeledah ruang kerja staf di kedua Direktorat tersebut. Dari kegiatan itu, KPK mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan langsung dengan konstruksi perkara.

"Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini," ungkapnya.

Tak hanya dokumen dan perangkat elektronik, penyidik juga menemukan sejumlah uang tunai. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran suap yang sedang ditelusuri KPK.

"Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara," kata Budi.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penyidikan bermula dari laporan PT Wanatiara Persada terkait kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2023 yang disampaikan pada September 2025.

Dalam proses pemeriksaan, petugas pajak menemukan potensi kurang bayar pajak yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 75 miliar. Namun, alih-alih menagih kekurangan tersebut sesuai ketentuan, diduga terjadi negosiasi

yang berujung pada pemberian suap untuk menurunkan nilai pajak.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Dari pihak penerima suap, tiga pejabat KPP Madya Jakarta Utara dijerat sebagai tersangka, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Tim Penilai Askob Bahtiar, serta Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Agus Syaifudin. Sementara dari pihak pemberi suap, KPK juga menetapkan pihak konsultan pajak dan perwakilan wajib pajak sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, pada Desember 2025 PT Niogayo Bisnis Konsultan mencairkan dana komitmen fee sebesar Rp 4 miliar. Dana tersebut kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura.

Uang itu selanjutnya diserahkan secara tunai oleh Abdul Kadim Sahbudin kepada Agus Syaifudin dan Askob Bahtiar selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek.

Pada Januari 2026, Agus dan Askob diduga mendistribusikan uang tersebut kepada sejumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta pihak-pihak lain. Saat proses distribusi inilah, KPK kemudian melakukan penangkapan.

KPK menegaskan pengusutan

perkara ini tidak berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan. Penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk di lingkungan DJP pusat.

"Dalam perkara ini tentu tidak berhenti di sini saja. Penyidik masih akan terus melacak dan menelusuri kaitannya dengan peran dari pihak-pihak lainnya, baik pada sisi Ditjen Pajak maupun pada sisi wajib pajaknya," ujar Budi kepada wartawan.

Langkah penggeledahan di dua Direktorat DJP pusat ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa KPK tengah mengendus kemungkinan adanya keterkaitan struktural atau aliran peran yang lebih luas dalam praktik suap pemeriksaan pajak tersebut.

Menanggapi kasus ini, Direktorat Jenderal Pajak langsung mengambil langkah administratif terhadap para pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka. DJP memberhentikan sementara tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara yang kini ditahan KPK.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan perbuatan para tersangka merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pegawai pajak. DJP, kata dia, tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran hukum.

"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan

dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023," ujar Rosmauli dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).

Ia juga menegaskan komitmen DJP untuk bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. DJP menyatakan siap memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik guna mengungkap perkara tersebut secara tuntas.

Selain itu, DJP akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola pengawasan, serta sistem pengendalian internal di unit terkait sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

Tak hanya kepada internal, DJP juga mendorong agar pihak swasta yang terlibat dalam perkara ini turut dikenakan sanksi administratif, termasuk kemungkinan pencabutan izin praktik konsultan pajak oleh otoritas terkait.

"DJP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJP terus melakukan pembenahan secara nyata dan tegas, sekaligus memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha," tutur Rosmauli.(gus,ist,met/dya)

Coretax Disorot, KPK Diminta Sikat Habis Korupsi Pajak

KASUS operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara kian membuka tabir persoalan mendalam di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tak hanya soal individu, proyek digitalisasi perpajakan Coretax kini ikut menjadi sorotan karena dinilai belum mampu menutup celah penyelewengan yang selama ini terjadi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa kasus suap yang menjerat pejabat pajak harus menjadi momentum serius untuk melakukan reformasi kelembagaan DJP secara menyeluruh. Menurutnya, pembenahan tidak boleh berhenti pada jargon atau slogan semata.

"Ya kita terus dorong proses reformasi, reformasi kelembagaan di Dirjen Pajak sehingga lebih efektif, karena by system harus dibuat mitigasinya. Jangan sampai nanti kita terlalu mengandalkan ke person to person ya," kata Kholid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).

Ia menekankan bahwa sistem perpajakan nasional harus dirancang untuk mematikan ruang gelap yang

memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

"Gimana nih caranya sistem perpajakan kita itu memitigasi sekecil mungkin, ruang untuk melakukan penyelewengan. Itu yang penting," sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Kholid juga menyinggung proyek Coretax yang sejatinya digadagadag menjadi tulang punggung digitalisasi dan transparansi sistem perpajakan. Namun dalam praktiknya, Coretax justru dinilai memunculkan persoalan baru.

"Kita dulu sebenarnya Coretax itu ke arah sana kan, bisa memperbaiki dengan sistem. Ya kita harapannya Coretax bisa melakukan itu, tapi ternyata Coretax ternyata juga banyak pekerjaan yang belum, malah justru menimbulkan masalah baru gitu ya," ujarnya.

Meski demikian, Kholid menegaskan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum agar mengusut tuntas perkara korupsi pajak tanpa pandang bulu.

"Ya siapa pun dia, ya kita tidak mentolerir ya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pelanggaran, abuse of power. Itu kan abuse of power ya ketika seorang pegawai

pajak melakukan hal seperti itu. Maka kita mendukung penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemenkeu) mencatat sebanyak 11,86 juta wajib pajak (WP) telah melakukan aktivasi akun Coretax per Senin (12/1/2026), pukul 14.00 WIB kemarin.

Angka tersebut bertambah tipis dibandingkan laporan sebelumnya atau pada 2 Januari 2026 lalu yang masih sebanyak 11,1 juta WP.

Secara terperinci, sebanyak 10,94 juta di antaranya berasal dari aktivasi wajib pajak (WP) orang pribadi. Kemudian, sebanyak 829,9 ribu dari WP Badan; 88,70 ribu dari WP Instansi pemerintah; serta WP PMSE sebanyak 223.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.867.729," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Sementara itu, Rosmauli mengatakan, sebanyak 126,7 ribu WP juga tercatat sudah melaporkan SPT Tahunan lewat sistem Coretax pada waktu yang sama..(wid,cnbc,ist/dya)

EMPAT WNI DICULIK BAJAK LAUT DI GABON, KEMLU UPAYAKAN PENYELAMATAN

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi terjadinya pembajakan kapal penangkap ikan IB FISH 7 (Liang Peng Yu 828) di perairan Ekwata, Gabon, Afrika Tengah, pada Minggu, 11 Januari 2026. Dalam insiden tersebut, sembilan anak buah kapal (ABK) dilaporkan diculik kelompok bajak laut, termasuk empat warga negara Indonesia (WNI).

FAKTA MENGENAI KONDISI GABON DAN SITUASI KEAMANANNYA PER JANUARI 2026

1. Keamanan Maritim (Ancaman Utama)

- **Zona Rawan:** Teluk Guinea, termasuk perairan Gabon, rawan pembajakan.
- **Insiden Terbaru:** 11 Januari 2026, kapal ikan IB FISH 7 diserang di perairan Ekwata.
- **WNI Diculik:** 9 ABK diculik, 4 di antaranya WNI.
- **Respon:** Angkatan Laut Gabon lakukan pengejaran intensif.

2. Politik & Pemerintahan

- **Status:** Transisi pascakudeta 2023.
- **Pemimpin:** Jenderal Brice Oligui Nguema (Presiden Transisi).
- **Stabilitas:** Relatif terkendali, tapi ditekan soal jadwal pemilu.

3. Keamanan Publik

- **Risiko Kriminal:** Perampokan dan serangan bersenjata, terutama malam hari.
- **Area Rawan:** Pantai sepi dan daerah terpencil sekitar Libreville.
- **Kendala:** Infrastruktur lemah, jalan buruk, transport mahal.

4. Fakta Tambahan

- **Kekayaan Alam:** Hutan hujan luas, dijuluki "Paru-paru Kedua Dunia".
- **WNI di Gabon:** ±708 orang, mayoritas terpantau aman oleh KBRI.



Peristiwa penculikan terjadi pada Sabtu (10/1/2025) malam di kapal penangkap ikan berbendera Gabon. Foto: Albatross

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menjelaskan kapal tersebut diawaki total 12 kru. Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa kabur para perompak, sementara tiga awak lainnya, termasuk dua WNI, berhasil selamat dan tetap berada di kapal.

"Pelaku pembajakan telah menculik 9 awak kapal dari total 12 awak, 4 di antaranya adalah WNI. Sementara, 3 awak lainnya (2 di antaranya WNI) saat ini dalam kondisi aman, dan tetap berada di kapal yang sama," ungkap Heni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/1/2026).

Heni memastikan aparat keamanan Gabon telah bergerak cepat menindaklanjuti insiden tersebut. Pasukan Angkatan Laut Gabon kini tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok bajak laut yang diduga kuat beroperasi di kawasan perairan rawan tersebut.

"Pasukan AL Gabon tengah memburu para pelaku," ujarnya. Lebih lanjut, Kemlu menyampaikan bahwa tiga awak kapal yang selamat saat ini berada dalam pengawalan ketat Angkatan Laut Gabon dan telah di-evakuasi menuju Libreville, ibu kota Gabon, guna menjalani proses pengamanan dan pendalaman lebih lanjut.

"3 awak kapal (termasuk 2 WNI) yang berada di kapal IB FISH 7 telah dikawal oleh Angkatan Laut Gabon menuju ke Libreville, ibukota Gabon," kata Heni.

Segera setelah menerima informasi pembajakan, Kemlu RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yaounde, Kamerun, langsung melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat, perusahaan atau agen kapal, serta pihak-pihak terkait lainnya. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelamatan para ABK yang masih disandera.

"Segera setelah mendapat informasi pembajakan, Kemlu melalui KBRI Yaounde melakukan koordinasi dengan otoritas setempat, perusahaan kapal, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat upaya penyelamatan awak kapal yang diculik," ujar Heni.

Selain fokus pada aspek keselamatan, Kemlu juga memastikan pemantauan kondisi kesehatan para WNI yang menjadi korban, serta menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para ABK, baik bagi mereka yang diculik maupun bagi keluarga yang ditinggalkan di Tanah Air.

Menurut Heni, KBRI Yaounde terus berkomunikasi dengan perusahaan kapal agar seluruh kewajiban terhadap para pekerja Indonesia tersebut tetap dipenuhi sesuai ketentuan.

Sementara itu, otoritas militer Gabon menyatakan insiden pembajakan terjadi saat kapal tengah beroperasi sekitar tujuh mil laut di tenggara wilayah Ekwata. Pemerintah pusat Gabon disebut telah mengambil alih penanganan kasus ini secara langsung dan menjadikannya sebagai prioritas keamanan maritim.

Hingga kini, Kemlu RI bersama KBRI Yaounde terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan seluruh langkah diplomatik serta koordinasi keamanan berjalan optimal.

"Kemlu dan KBRI Yaounde akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan kasus ini," pungkas Heni.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengupayakan keselamatan empat WNI yang masih berada dalam penyanderaan, sembari berharap operasi pengejaran yang dilakukan aparat Gabon dapat segera membuahkan hasil. (wid,ist,kum/dya)

DPR Sebut Alarm Meningkatnya Ancaman di Jalur Maritim

KASUS penculikan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bajak laut di perairan Gabon, Afrika Tengah, menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk bergerak cepat, sigap, dan terkoordinasi dalam menangani insiden tersebut demi memastikan keselamatan para korban.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, menegaskan bahwa keselamatan empat WNI harus menjadi prioritas utama negara. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap lamban atau menunggu terlalu lama hanya untuk

memastikan kebenaran informasi yang beredar, mengingat situasi di lapangan bersifat darurat dan menyangkut nyawa warganegara.

"Keselamatan empat WNI harus menjadi prioritas utama. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, harus bergerak cepat dan tidak boleh lamban menghadapi situasi seperti ini," kata Syamsu Rizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/1/2026).

Menurut Syamsu, Kemlu perlu segera mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas setempat di Gabon serta mitra internasional. Langkah ini dinilai penting untuk menentukan opsi terbaik dalam upaya

penyelamatan para WNI yang menjadi korban penculikan.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani kasus pembajakan dan penyanderaan WNI di luar negeri. Salah satu contoh yang disorot adalah keberhasilan operasi penyelamatan kapal kargo MV Sinar Kudus yang dibajak perompak di perairan Somalia pada 2011.

"TNI memiliki pengalaman berharga dalam operasi penyelamatan WNI di luar negeri, seperti pada kasus MV Sinar Kudus. Pengalaman tersebut harus menjadi modal penting jika diperlukan langkah-langkah khusus demi menyelamatkan saudara-saudara kita," ujarnya. (wid,ist,kum/dya)